

**Volume 28, Nomor 2, Juli - September 2015**  
**Akreditasi LIPI Nomor: 565/Akred/P2MI-LIPI/04/2014**

**ISSN: 0215 - 7829**

# **PENAMAS**

**JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN**



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA JAKARTA**  
**2015**

---

---

## DARI MEJA REDAKSI

---

---

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa—Allah SWT., Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan) Volume 28, Nomor 2, Juli-September 2015 ini dapat diterbitkan dan hadir di hadapan pembaca. Sebagai bagian dari peningkatan kualitas jurnal ilmiah, dari waktu ke waktu kami terus berupaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas terbitan dan cetakan untuk mendukung kualitas karya ilmiah itu sendiri. Hal ini tiada lain, agar ilmu pengetahuan yang kami produksi dapat lebih bermanfaat, terutama bagi kebijakan pembangunan bidang agama, dan masyarakat pada umumnya.

Jurnal PENAMAS edisi kali ini menyajikan sebanyak 9 artikel, yang kesemuanya terkait dengan kehidupan keagamaan, pendidikan agama dan keagamaan, serta lektur dan khazanah keagamaan. Ketiga bidang penelitian atau kajian ini tetap menjadi fokus Jurnal PENAMAS, karena sesuai dengan Tugas dan Fungsi (TUSI) kami sebagai lembaga penelitian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Agama.

Segecap Dewan Redaksi Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan) mengucapkan terima kasih kepada para Mitra Bestari Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan), terutama mereka yang memberikan koreksi dan saran perbaikan (*review*) untuk artikel-artikel Volume 28, Nomor 2, Juli-September 2015 ini, yakni: Prof. Dr. M. Bambang Pranowo (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) dan Prof. Dr. M. Hisyam (LIPI). Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Alfida, MLIS yang secara khusus menerjemahkan abstrak-abstrak artikel pada nomor kali ini ke dalam bahasa Inggris.

Akhirnya, kami berharap artikel-artikel yang disajikan pada edisi kali ini dapat memberikan kontribusi, baik sebagai bahan/dasar pertimbangan kebijakan di bidang pembangunan agama maupun pengembangan ilmu pengetahuan agama dan masyarakat secara umum.

Selamat membaca!

Jakarta, Juli 2015  
Dewan Redaksi

# PENAMAS

JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN

Volume 28, Nomor 2, Juli - September 2015  
Halaman 173 - 350

---

---

## DAFTAR ISI

---

---

PROBLEMATIKA PEMANFAATAN BUKU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA  
SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN MAMUJU

Idham ----- 259 - 276



---

---

## PROBLEMATIKA PEMANFAATAN BUKU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN MAMUJU

### *PROBLEMS IN THE USE OF ISLAMIC EDUCATION BOOKS IN ISLAMIC PRIMARY SCHOOL IN MAMUJU*

---

---

IDHAM

**Idham**

Balai Penelitian dan  
Pengembangan Agama  
Makassar  
Kantor: Jl. A.P. Pettarani No. 72  
Makassar  
email: idbodi@yahoo.co.id  
Naskah Diterima:  
Tanggal 15 Juli 2015.  
Revisi 20 Agustus-3  
September 2015.  
Disetujui 5 September 2015.

**Abstract**

*This study aims to know: 1) the conditions of primary schools in Mamuju regency, 2) the availability of Islamic Religious Education (PAI) books in primary schools, 3) the utilization mechanism of Islamic Religious Education textbooks in primary school, and the problems faced by educators and learners in utilizing PAI books in primary school. Using qualitative descriptive method, the study found that there is limited availability of PAI books in those schools; due to the fact that the curriculum 2013 has not implemented optimally. The acquisition of books evidently has been done through waiting for center to be distributed in schools. The limitation also hampered the use of PAI books either as required or recommended books. Although in some aspects, the schools independently acquire books to anticipate the fulfillment of teaching materials. Strengthening teachers capacity in terms of technical assistance has not been done evenly. This results in the lack of implementing knowledge for PAI primary school teachers in Mamuju.*

**Keywords:** *Religious education book, Primary school, Educational policy, Mamuju*

**Abstrak**

Penelitian ini berangkat dari keinginan untuk mengetahui: 1) kondisi Sekolah Dasar di Kabupaten Mamuju, 2) ketersediaan buku Pendidikan Agama Islam di sekolah dasar, 3) mekanisme pemanfaatan buku-buku paket PAI di Sekolah Dasar serta problem yang dihadapi oleh pendidik dan peserta didik dalam memanfaatkan buku PAI di Sekolah Dasar. Melalui metode kualitatif deskriptif, penelitian ini menemukan keterbatasan ketersediaan buku PAI di sekolah sasaran, dikarenakan implementasi kurikulum 2013 yang masih belum maksimal yang ditandai dengan pengadaan buku yang masih "menunggu distribusi dari pusat" untuk disalurkan di sekolah. Keterbatasan itu pula yang menghambat pemanfaatan buku PAI, baik wajib maupun penunjang. Meski pada beberapa aspek, inisiatif pengadaan secara mandiri tetap dilakukan sebagai antisipasi pemenuhan bahan ajar. Penguatan kapasitas guru dalam hal bimbingan teknis juga masih belum dilakukan secara merata mengakibatkan keterbatasan pengetahuan implementatif dari mereka para guru-guru PAI Sekolah Dasar di Mamuju.

**Kata Kunci:** *Buku pendidikan agama, sekolah dasar, kebijakan pendidikan, Mamuju*

## PENDAHULUAN

Pendidikan mempunyai peran sangat besar dalam membangun dan mengembangkan potensi peserta didik. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 menyatakan, bahwa "Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab". Di samping itu, Pasal 4 ayat (4) menyatakan, bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Pendidikan diharapkan dapat menyiapkan peserta didik memiliki ketahanan diri untuk mempertahankan eksistensi, kepribadian, dan keunggulan moralnya di tengah kemajemukan budaya dan nilai-nilai dari bangsa lain. Pada saat memasuki era global bangsa kita mempunyai ketahanan sikap yang kuat, dapat dipersiapkan melalui pendidikan. Salah satu pendidikan yang berperan kuat dalam era tersebut adalah pendidikan agama.

Pendidikan agama merupakan pendidikan yang memberikan pengetahuan, keterampilan, dan membentuk sikap peserta didik dalam mengamalkan ajaran agama pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Pendidikan agama secara umum berfungsi untuk membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang

maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kerukunan hubungan antara umat beragama (Penjelasan Pasal 37 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas). Selain itu, pendidikan agama juga bertujuan untuk menumbuhkembangkan kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang mengimbangi pengusaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Zakiah Derajat mengatakan, bahwa Pendidikan Agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh, menghayati tujuan, dan pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup (Sulistyowati, 2012, 63-76). Oleh karena itu, ketika kita menyebut pendidikan Islam, maka akan mencakup dua hal, yaitu: *Pertama*, mendidik siswa agar untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai atau akhlak yang islami. *Kedua*, mendidik siswa-siswi untuk mempelajari materi ajaran Islam (subjek pelajaran berupa pengetahuan tentang ajaran Islam).

Salah satu kelemahan proses pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di sekolah adalah keterbatasan sarana/prasarana, sehingga pengelolaan cenderung seadanya. Pendidikan agama yang diklaim sebagai aspek yang penting seringkali kurang diberi prioritas dalam urusan fasilitas. Selain itu, metodologi pendidikan agama kurang mendorong penjiwaan terhadap nilai-nilai keagamaan. Buku paket pendidikan agama juga belum memadai untuk membangun kesadaran beragama, memberikan keterampilan fungsional keagamaan dan mendorong perilaku bermoral dan berakhlak mulia pada peserta didik (Muhaimin 2005,

25-26). Hasil penelitian Litbang Agama Makassar tentang reformulasi buku paket di madrasah menyebutkan, bahwa kurangnya buku penunjang pelajaran Pendidikan Agama di sekolah-sekolah juga menjadi salah satu penyebab kurang maksimalnya sistem transfer pengetahuan dan pengamalan ajaran agama Islam, sebab para guru dan siswa lebih terpaku pada desain yang ditetapkan oleh kurikulum tanpa inisiatif dan kreatifitas untuk mencari bahan bacaan lainnya, terlebih secara kuantitas, ketersediaan buku di perpustakaan sekolah juga sangat terbatas (As'ad 2014, 7). Hal ini juga diperkuat oleh penelitian pengelolaan perpustakaan madrasah yang salah satu poin penting temuannya adalah terbatasnya buku-buku agama dalam koleksi perpustakaan sekolah/madrasah (Muslim 2014, 11).

Padahal, jika merujuk pada standar nasional pendidikan, tuntunan pemberian Pendidikan Agama Islam memiliki visi untuk mewujudkan manusia yang bertakwa kepada Allah SWT. dan berakhlak mulia, serta bertujuan untuk menghasilkan manusia yang jujur, adil, berbudi pekerti, etis, saling menghargai, disiplin, harmonis dan produktif, baik personal maupun sosial. Tuntutan visi ini mendorong dikembangkannya standar kompetensi sesuai dengan jenjang persekolahan yang secara nasional ditandai dengan ciri-ciri: (1) lebih menitikberatkan pencapaian kompetensi secara utuh selain penguasaan materi; (2) mengakomodasikan keragaman kebutuhan dan sumber daya pendidikan yang tersedia; (3) memberikan kebebasan yang lebih luas kepada pendidik di lapangan untuk mengembangkan strategi dan program pembelajaran sesuai dengan kebutuhan

dan ketersediaan sumber daya pendidikan. Pendidikan Agama Islam di SD/MI bertujuan untuk: (1) menumbuhkembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, dan pengembangan, pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia Muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah SWT.; (2) mewujudkan manusia Indonesia yang taat beragama dan berakhlak mulia, yaitu manusia yang berpengetahuan, rajin beribadah, cerdas, produktif, jujur, adil, etis, berdisiplin, bertoleransi (*tasamuh*), menjaga keharmonisan secara personal dan sosial serta mengembangkan budaya agama dalam komunitas sekolah (Badan Standar Nasional Pendidikan 2006).

Adapun fungsi Pendidikan Agama Islam di SD untuk: (a) penanaman nilai ajaran Islam sebagai pedoman mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat; (b) pengembangan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. serta akhlak mulia peserta didik seoptimal mungkin, yang telah ditanamkan lebih dahulu dalam lingkungan keluarga; (c) penyesuaian mental peserta didik terhadap lingkungan fisik dan sosial melalui Pendidikan Agama Islam; (d) perbaikan kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan, pengamalan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari; (e) pencegahan peserta didik dari hal-hal negatif budaya asing yang akan di hadapinya sehari-hari; (f) pengajaran tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum (alam nyata dan non nyata), sistem dan fungsionalnya; (g) penyaluran siswa untuk mendalami pendidikan agama ke lembaga pendidikan

yang lebih tinggi. Selain itu, Pendidikan Agama Islam di SD bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan, melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengamalan serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia Muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, ketakwaannya kepada Allah SWT. serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta untuk dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi (Rikmasari dan Khaerani 2010, 27).

Berdasar pada latar belakang di atas, maka dipandang perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut, yang dirangkum dalam permasalahan pokok, yakni bagaimana problematika pemanfaatan buku Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar? Pokok masalah tersebut kemudian diturunkan pada beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi Sekolah Dasar di Kabupaten Mamuju?
2. Bagaimana ketersediaan buku Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar?
3. Bagaimana mekanisme pemanfaatan buku-buku paket PAI di Sekolah Dasar?
4. Bagaimana problem yang dihadapi oleh pendidik dan peserta didik dalam memanfaatkan buku PAI di Sekolah Dasar?

Adapun tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui problematika yang dihadapi dalam hal pemanfaatan buku Pendidikan Agama Islam disatuan pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.

## **Kerangka Konsep**

Salah satu aspek yang mendukung proses transfer ilmu pengetahuan adalah dengan buku teks. Buku teks tidak dapat dipisahkan dari dunia pendidikan. Sebagai media dan sumber pembelajaran, buku teks mampu mentransformasikan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kehidupan yang berkaitan dengan kompetensi dasarnya yang diajarkan. PemiLihat buku teks sangat penting berkaitan dengan kualitas dan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Akan tetapi, melimpahnya jenis dan model buku pelajaran (khususnya buku PAI) di masyarakat itu, apakah sudah bisa dimaksimalkan pemanfaatannya oleh mereka yang terlibat langsung dalam proses pendidikan formal di sekolah dasar?

Belum lagi jika dikaitkan dengan kreatifitas guru dan siswa dalam rangka pemenuhan asa religiusitas yang membutuhkan buku-buku agama Islam penunjang lainnya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keterpenuhan pemahaman mendalam, terkait penjelasan-penjelasan tambahan atas materi agama Islam yang tertuang dalam buku wajib PAI yang sudah ada/dianjurkan/diberlakukan. Tentu saja hal ini menjadi catatan tersendiri terkait aspek teknis dan sistem pemanfaatan buku-buku yang boleh jadi belum/tidak terdistribusi baik di sekolah.

Artinya, peluang untuk memaksimalkan pemahaman keagamaan melalui buku-buku pelajaran dan atau buku penunjang lainnya yang berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, secara kuantitas memang masih dianggap kurang tersedia dengan baik di sekolah-sekolah, baik buku pegangan guru PAI maupun ketersediaan di perpustakaan sekolah. Demikian halnya

dengan buku pegangan Pendidikan Agama Islam dan budi pekerti Kurikulum 2013, yang pengadaannya masih berbasis *internet download services*.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini difokuskan pada penelusuran terkait segala hal yang menjadi problematika pemanfaatan buku Paket Pelajaran Agama Islam di Sekolah Dasar, dengan terlebih dahulu mengidentifikasi buku-buku paket apa saja yang telah ada dan yang dibutuhkan oleh guru dan siswa Sekolah Dasar. Selanjutnya, melakukan identifikasi terhadap cara mereka (guru dan siswa) memanfaatkan buku-buku yang tersedia itu, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka mewujudkan tujuan Pendidikan Agama Islam, yakni menumbuhkembangkan akidah dan mewujudkan manusia Indonesia yang taat beragama dan berakhlak mulia. Pemanfaatan buku paket PAI di Sekolah Dasar juga sangat erat kaitannya dengan sistem distribusi dan pengadaan buku tersebut di sekolah-sekolah.

Penelitian ini dalam bentuk deskriptif kualitatif, dengan melakukan penelusuran problematika pemanfaatan buku Pelajaran Agama Islam di Sekolah Dasar. Adapun metode pengumpulan data yang lazim digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu observasi dan wawancara (Cresswell 1994). Penggunaan metode ini diharapkan dapat mengungkap data lebih dalam dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (*indepth interview*). Penggunaan satu teknik penelitian tentunya tidak dapat menjamin validitas data. Karena itu, teknik wawancara digunakan berpasangan dengan teknik observasi/pengamatan. Teknik

ini digunakan untuk melihat bagaimana aktivitas pemanfaatan buku PAI, baik di sekolah, dalam ranah sosial kemasyarakatan maupun ketika berada di lingkungan tempat tinggal/keluarganya. Observasi juga digunakan untuk melihat bagaimana mereka beraktivitas.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Kondisi Sekolah Dasar di Kabupaten Mamuju**

Sekolah Dasar di Kabupaten Mamuju sebanyak 305 sekolah yang tersebar pada 11 kecamatan. Ke-305 sekolah tersebut terdiri atas: SDN dan SD Inpres terdapat dua sekolah swasta, yakni SD Islam Terpadu Wildan dan SD Integral Al-Furqan. Selain itu, terdapat pula dua SLB, yakni SLB Dharmawanita dan SLBN Mamuju. Dari ke-305 SD di Kabupaten Mamuju, hanya ada 5 sekolah yang terakreditasi A, yakni: 1) SDN 1 Mamuju di Kecamatan Mamuju; 2) SD Inpres Salukayu 1 di Kecamatan Papalang; 3) SD Inpres Karema di Kecamatan Simboro; 4) SDN 2 Karema Simboro di Kecamatan Simboro; dan 5) SD Inpres Simboro di Kecamatan Simboro. Selebihnya belum terakreditasi sebanyak 112 sekolah, terakreditasi C sebanyak 109 sekolah, dan terakreditasi B sebanyak 79 sekolah.

Data Emis Kementerian Agama Kabupaten Mamuju menunjukkan, bahwa dari 305 Sekolah Dasar di Kabupaten Mamuju tersebut, terdapat guru Pendidikan Agama Islam (PAI) sebanyak 154 orang dengan rincian: PNS 84 orang dan selebihnya 70 orang non PNS. Dari 154 orang guru tersebut, yang sudah sertifikasi baru 100 orang. Pada umumnya, guru PAI

di Kabupaten Mamuju sudah sarjana, yakni sebanyak 124 orang dan selebihnya 30 orang non sarjana. Banyaknya SD dengan jumlah guru PAI yang ada tidak berbanding lurus, 305 sekolah dengan jumlah guru hanya 154 menunjukkan, bahwa di Kabupaten Mamuju masih sangat kekurangan guru PAI. Masih ada hampir 50% Sekolah Dasar yang tidak mempunyai guru PAI.

Berikut ini dipaparkan kondisi riil empat Sekolah Dasar di Kabupaten Mamuju yang tersebar pada dua kecamatan, yakni Kecamatan Mamuju dengan memilih SDN 1 Mamuju (akreditasi A) dan SDN Tahaja-Haja (belum terakreditasi) serta Kecamatan Papalang dengan memilih SDN Salukayu I (akreditasi A) dan SDN Sakio (akreditasi B). PemiLihat keempat sekolah pada dua kecamatan dengan sekolah yang berbeda tingkat akreditasinya tersebut, untuk melihat variasi problematika pemanfaatan buku PAI tersebut.

#### *SDN I Mamuju Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju (Akreditasi A)*

SDN 1 Mamuju merupakan salah satu SD dari lima SD yang terakreditasi A di Kabupaten Mamuju. Sekolah ini adalah sekolah yang tertua di Mamuju, didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda tanggal 1 September 1928 dengan SK izin operasional tanggal 1 Januari 1910. Sebagai sekolah yang tertua, sekolah ini berada di tengah ibukota Mamuju (dekat Pasar Sentral lama), berada di antara Pasar Sentral lama dengan rumah jabatan lama Bupati Mamuju, tepatnya di Jalan Sultan Hasanuddin 112 Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju. Selain berada di jantung ibukota, sekolah ini pun merupakan satu di antara dua Sekolah

Dasar yang bangunannya bertingkat dua di Mamuju.

SDN I Mamuju berada pada areal tanah 3092 m<sup>2</sup>. Dengan bangunan prasarana yang ada dengan lahan yang tersedia, tampak sekolah ini sangat padat akan bangunan. SDN 1 Mamuju dengan NPSN/NSS: 40600275/101330101001 ini terakreditasi A berdasarkan SK akreditasi 060/BAP-SM/PROP-23/LL/X/2011 tertanggal 27 Oktober 2011.

Sebagai sekolah unggulan, SD ini setiap tahunnya menjadi favorit orangtua murid untuk menyekolahkan anaknya di sini. Banyak calon murid yang ditolaknya, bahkan untuk mengantisipasi, sekolah ini membuka kelas pagi dan sore. Kelas sore diperuntukkan bagi kelas 3 dan 4 masing-masing 4 kelas.

#### *SD Negeri Tahaja-haja Kecamatan Mamuju (Belum Terakredrtasi)*

SD Negeri Tahaja-haja awalnya merupakan Sekolah Dasar Kecil (SDK) dengan NSS: 101330101028 dan NPSN: 40604697. Karena tidak adanya regulasi tentang SD kecil, maka berdasarkan kebijakan Bupati Mamuju, maka semua SD yang tergolong SD kecil dihapuskan dan diganti menjadi Sekolah Dasar Negeri (SDN). SDN Tahaja-haja beralamat di Jalan Kasuari Kelurahan Mamuju Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju. Walaupun jarak dari Kantor Bupati Mamuju sekitar 2 km, akan tetapi akses jalan ke sekolah ini tergolong kurang diperhatikan. Terbukti, tahun 2014, baru ada pengaspalan jalan menuju sekolah ini, dan sebagiannya masih berupa pengerasan jalan. Demikian halnya dengan prasarana yang lain, seperti listrik belum sampai di SDN Tahaja-haja ini.

Awal pendirian sekolah ini bermula pada tahun 1997, di mana Kepala Lingkungan sendiri yang menghibahkan tanahnya sekitar 35 x 35 M, termasuk akses jalan yang ada sekarang, secara otomatis lokasi sekolah berkurang. Selain itu, lokasi berada di antara dua lereng gunung dan berdekatan dengan sungai kecil. Di areal inilah, bangunan sekolah didirikan dengan luas 8 x 24 meter. Bangunan yang ada sudah permanen dengan lantai marmer berwarna putih. Satu-satunya bangunan yang ada tersebut dibagi dalam tiga ruangan.

Adapun jumlah murid SDN Tahaja-haja sebanyak 107 orang, yang tersebar mulai dari kelas satu sampai kelas enam. Sedangkan tenaga pengajar sebanyak 17 orang, dengan rincian: PNS sebanyak 7 orang, tenaga Kontrak Kabupaten 5 orang, dan tenaga honorer sebanyak 5 orang. Adapun guru Pendidikan Agama Islam berstatus PNS alumni Fakultas Tarbiyah STAI DDI Polman dan sudah tersertifikasi. Dengan jumlah siswa 107 orang yang terbagi dalam enam kelas/rombongan belajar, dengan sarana kelas tiga ruang jelas tidak mencukupi. Para guru berinisiatif membagi tiga ruang tersebut menjadi ruang pertama untuk kelas I dan kelas II, ruang kedua untuk kelas IV dan V, ruang ketiga untuk kelas VI, serta ruang istirahat guru/kantor. Adapun ruang belajar kelas III adalah ruang pertama setelah kelas I pulang, yakni jam 10.00-12.30.

Sarana yang lain di SD ini adalah toilet darurat, berdinding papan yang hanya diperuntukkan bagi guru. Toilet darurat ini selalu dalam keadaan terkunci. Kuncinya disimpan di ruang guru dan hanya diambil bila guru yang bersangkutan membutuhkannya. Kondisi lahan yang sempit, tidak ada lapangan bermain dan

upacara bendera, maka di sekolah ini tidak ada upacara bendera. Adapun olahraga murid dilakukan di jalanan umum sekitar sekolah.

Kondisi ruangan belajar yang satu ruangan disekat triplex menjadi dua rombongan kelas mengakibatkan antara kelas yang satu dengan kelas yang lainnya saling mengganggu. Keadaan lingkungan yang berada seperti dilembah karena diapit oleh dua gunung, perasaan keadaan selalu mendung, kurang cahaya matahari ditambah lagi daerah ini belum dijangkau oleh penerangan listrik. Sungguh ironis, SD yang masih berada di kelurahan, tidak terlalu jauh dari Kantor Bupati Mamuju, ibukota Provinsi Sulawesi Barat, akan tetapi keadaannya sangat memprihatinkan. Wajarlah apabila SD ini belum terakreditasi.

#### *SD Inpres Salukayu I Desa Salukayu Kecamatan Papalang (Terakreditasi A)*

SD Inpres Salukayu I adalah satu-satunya SD yang terakreditasi A di Kecamatan Papalang dan salah satu SD dari 5 SD yang terakreditasi A di Kabupaten Mamuju. Bila kita hendak ke sekolah ini, maka kita akan menelusuri jalan poros menuju Mamuju Tengah. Tepat di Desa Boda-Boda, belok ke kiri sekitar 4 KM. Jarak dari kota Mamuju menuju Boda-boda sekitar 69 KM. Jadi jarak sekolah ini ke Kota Mamuju sekitar 70 KM. Kondisi masyarakat setempat sekolah adalah daerah transmigrasi.

SDN Inpres Salukayu I ini berdiri pada tahun 1989 pada areal 6.500 m. Sekolah ini berada di tengah perumahan penduduk yang tertata rapi, ini dapat dipahami karena tanah transmigrasi adalah tanah pembagian pemerintah yang sudah dikapling-kapling.

Di depan sekolah terdapat lapangan sepakbola. Bukan hanya SD Inpres ini yang menghadap ke lapangan tersebut, tetapi juga terdapat SMP Salikayu. Bangunan gedung SD Inpres Salu Kayu I ini terdiri atas satu bangunan yang memanjang yang diperuntukkan 6 rombel. Pada sisi kanan terdapat bangunan perpustakaan dan sebelah kanan terdapat bangunan untuk ruangan kepala sekolah dan ruangan laboratorium. Keadaan halaman sekolah cukup asri, karena ditumbuhi beberapa pohon dan kembang yang berwarna warni. Pada sekolah ini pula terdapat kebun sekolah tepatnya di belakang gedung kantor. Cukup banyak jenis tanaman di kebun sekolah ini. Keasrian sekolah ini menjadikannya salah satu sekolah yang selalu dikunjungi oleh pejabat dari pusat dan tempat studi banding bagi sekolah di sekitarnya.

Jumlah murid di SD Inpres Salu Kayu I Papalang hanya 152 orang, yang tersebar pada 6 tingkatan kelas, dengan rincian: 74 orang laki-laki dan 78 orang perempuan. Adapun komposisi murid berdasarkan agama: Islam 136 orang dan Hindu 16 orang. Murid-murid tersebut dibina oleh 7 orang guru, yang terdiri dari: 6 guru umum dan 1 orang guru Penjaskes. Guru agama yang ada hanyalah guru honorer yang baru lulus setahun yang lalu. Guru tersebut belum masuk dalam guru kontrak daerah apalagi PNS.

#### *SDN Sakio Desa Topore Kecamatan Papalang (Terakreditasi B)*

SDN Sakio adalah salah satu SD di Kecamatan Papalang yang terakreditasi B. Sekolah ini berdiri pada tahun 1991. Awalnya, sekolah ini bernama SDK (Sekolah Dasar Kecil). Sekolah

Dasar Kecil adalah nama bagi sekolah yang muridnya kurang dari 80 orang. SDK adalah sekolah yang pendiriannya atas kebijakan pemerintah setempat. Jadi SDK hanya dikenal di Kabupaten Mamuju. Akan tetapi, sejak akhir tahun 2014, sebutan SDK sudah tidak ada lagi. Semua SDK dijadikan Sekolah Dasar Negeri.

Sekolah SDK Sakio cukup jauh dari ibukota kabupaten, yakni sekitar 65 KM arah Kabupaten Mamuju Tengah. Pada KM 65, tepatnya di depan SD Inpres Mandar Pitu belok kiri, maka kita akan menempuh perjalanan sekitar 3 KM melewati aliran sungai dan mendaki kemudian menurun. Di sanalah SDK Sakio. Penduduk sakio umumnya pendatang dari Kabupaten Polewali Mandar. Dusun Sakio sekitar 150 KK ini berdiri sebuah masjid. Sekolah ini dikelilingi oleh rumah penduduk, baik rumah panggung maupun rumah non panggung semi permanen. Sekitar sekolah banyak ditemukan kebun kakao. Kakao adalah profesi utama masyarakat Sakio.

Lokasi bangunan sekolah adalah wakaf dari masyarakat setempat, dengan ukuran panjang 50 M dan lebar 30 M. Di atas bangunan berdiri tiga buah bangunan (satu bangunan permanen/sudah ditegel dengan tiga ruang belajar, satu bangunan semi permanen, dan satu bangunan darurat). Pada bangunan darurat inilah yang dijadikan ruang ke sekolah dan ruang guru.

#### **Ketersediaan Buku Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Mamuju**

Buku Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Mamuju, khususnya pada empat sekolah yang menjadi sasaran penelitian sungguh

memprihatinkan. Buku pegangan kelas 1, 2, 4, dan 5 adalah K-13. Sementara kelas 3 dan 6 masih menggunakan KTSP. Khusus KTSP, guru dan murid sudah memilikinya walaupun masih jauh dari ideal (1:1), karena dari observasi peneliti Buku KTSP pun masih banyak murid yang belum memilikinya. Adapun K-13 untuk kelas 1, 2, 4, dan 5, pada umumnya hanya guru yang memilikinya dengan cara mengunduh sendiri di internet atau memfotokopi pada teman sesama guru yang telah dahulu memperolehnya.

Pada SDN I Mamuju dan SD Inpres Salukayu I Papalang, selain guru, sebagian kecil murid sudah memiliki buku K-13 dengan cara menfotokopi dan murid yang belum memiliki menyalin pada teman-temannya atau menulis saat mata pelajaran Agama Islam. Adapun pada sekolah SDN Sakio Papalang dan SDN Tahaya-Haya Mamuju, buku K-13 hanya dimiliki oleh gurunya sebagai buku pegangan. Tidak ada murid yang memilikinya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, guru terpaksa menyalin di papan tulis atau mendiktekannya.

Keempat sekolah yang diteliti di atas, hanya SDN 1 Mamuju dan SD Inpres Salukayu I Papalang yang memiliki perpustakaan. Adapun buku-buku agama yang ada di perpustakaan pada kedua sekolah tersebut adalah bantuan Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju yang satu paket dengan pengadaan bangunan perpustakaan yang diadakan oleh rekanan (pihak ketiga). Yang mana buku-buku yang ada di dalamnya kadang tidak sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Adapun buku agama yang ada di Perpustakaan SDN 1 Mamuju sangat tidak memadai bila dibandingkan dengan jumlah guru dan murid yang ada.

Buku-buku yang tersedia di perpustakaan tersebut di atas hanya berupa buku-buku KTSP dan dari segi kuantitas jelas tidak memadai. Belum ada inisiatif pihak sekolah (SDN I Mamuju) untuk mengadakan buku-buku, khususnya buku PAI. Pihak sekolah hanya menunggu buku-buku pengadaan/drop-an dari atas yang tak kunjung ada. Terbatasnya buku wajib dan pengangan guru di perpustakaan mengindikasikan kurangnya pihak sekolah terhadap buku paket, khususnya buku paket agama. Buku perpustakaan yang ada hanya 3.847 buah buku dengan 194 judul. Padahal, dengan jumlah siswa yang ada, dana BOS dapat dialihkan untuk pembelian buku, karena tujuan dari dana BOS memungkinkan untuk itu, karena ditinjau dari segi tujuan utama dana BOS adalah pengadaan buku teks.

Sebagai daerah baru, Sulawesi Barat yang ibukotanya Kabupaten Mamuju jelas belum dapat disejajarkan dengan provinsi atau kota-kota lain dari segi ketersediaan buku. Belum ada perpustakaan daerah yang representatif. Demikian halnya dengan toko buku. Dari penelusuran peneliti, hanya ada 3 toko buku di Mamuju, yakni: Monster Buku, Citra Harmoni, dan Jakarta Buku. Dari kedua toko buku tersebut, stok bukunya pada umumnya buku umum dan itu pun terbatas, belum ada toko buku yang khusus menjual buku-buku agama. Pada umumnya, mereka yang mau beli buku langsung memesan ke Makassar.

Belajar menggunakan buku adalah suatu perantara yang merupakan sumber pesan belajar yang ingin diteruskan kepada penerima pesan dan memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam proses belajar. Proses belajar tersebut akan mempengaruhi perubahan tingkah laku seseorang yang

lebih baik dalam pengetahuan, sifat, sikap, dan nilai-nilai positif lainnya sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam berinteraksi di sekitar lingkungan dan buku menjadi salah satu media dalam proses pembelajaran individu tersebut (Mayusa 2013, 13).

### **Mekanisme Pemanfaatan Buku Pendidikan Agama Islam di Mamuju**

Buku teks pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), baik wajib maupun penunjang di Kabupaten Mamuju pada umumnya tidak ada yang ambil peduli. Antara Kementerian Agama Kabupaten Mamuju dan Kementerian Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Mamuju jalan sendiri-sendiri, tidak ada koordinasi, saling melempar tanggung jawab. Kementerian Agama beralih, bahwa SD bukanlah kewenangan Kementerian Agama. Sementara itu, Kementerian Pendidikan beralih, bahwa seharusnya yang mengurus keagamaan, seperti guru dan pengadaan buku adalah tanggung jawab Kementerian Agama.

Guru memperoleh bahan ajar/buku dengan cara mengunduh atau menfotokopi dari temannya. Hasil kopian tersebut disimpan di tempat fotokopi, bagi murid yang mau memiliki tinggal memesan ke tempat fotokopi tersebut. Tidak semua murid atau pun orangtua murid berinisiatif untuk menkopi, boleh jadi murid beralasan bisa meminjam kepada temannya karena proses belajar mengajar di kelas pun dengan cara mendikte. Guru membacakan dan murid menulis atau sama-sama menulis, guru menulis di papan tulis dan murid mengikutinya menulis di buku masing-masing.

Padahal jika merujuk pada standar nasional pendidikan, tuntunan pemberian Pendidikan Agama Islam memiliki visi untuk mewujudkan manusia yang bertakwa kepada Allah SWT. dan berakhlak mulia, serta bertujuan untuk menghasilkan manusia yang jujur, adil, berbudi pekerti, etis, saling menghargai, disiplin, harmonis, dan produktif, baik personal maupun sosial. Tuntutan visi ini mendorong dikembangkannya standar kompetensi sesuai dengan jenjang persekolahan yang secara nasional ditandai dengan ciri-ciri: 1) lebih menitikberatkan pencapaian kompetensi secara utuh selain penguasaan materi; 2) mengakomodasikan keragaman kebutuhan dan sumber daya pendidikan yang tersedia; 3) memberikan kebebasan yang lebih luas kepada pendidik di lapangan untuk mengembangkan strategi dan program pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya pendidikan. Pendidikan Agama Islam di SD/MI bertujuan untuk: (a) menumbuhkembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, dan pengembangan, pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia Muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah SWT.; (b) mewujudkan manusia Indonesia yang taat beragama dan berakhlak mulia, yaitu manusia yang berpengetahuan, rajin beribadah, cerdas, produktif, jujur, adil, etis, berdisiplin, bertoleransi (*tasamuh*), menjaga keharmonisan secara personal dan sosial serta mengembangkan budaya agama dalam komunitas sekolah (Badan Standar Nasional Pendidikan 2006).

Adapun fungsi Pendidikan Agama Islam di SD untuk: (a) penanaman nilai ajaran Islam sebagai pedoman mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat; (b) pengembangan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. serta akhlak mulia peserta didik seoptimal mungkin, yang telah ditanamkan lebih dahulu dalam lingkungan keluarga; (c) penyesuaian mental peserta didik terhadap lingkungan fisik dan sosial melalui Pendidikan Agama Islam; (d) perbaikan kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan, pengamalan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari; (e) pencegahan peserta didik dari hal-hal negatif budaya asing yang akan dihadapinya sehari-hari; (f) pengajaran tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum (alam nyata dan non nyata), sistem dan fungsionalnya; (g) penyaluran siswa untuk mendalami pendidikan agama ke lembaga pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu, Pendidikan Agama Islam di SD bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan, melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengamalan serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia Muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, ketakwaannya kepada Allah SWT. serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta untuk dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi (Rikmasari dan Khaerani 2010, 27).

Salah satu aspek yang mendukung proses transfer ilmu pengetahuan adalah dengan buku teks. Buku teks tidak dapat dipisahkan dari dunia pendidikan. Sebagai media dan sumber pembelajaran, buku

teks mampu mentransformasikan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kehidupan yang berkaitan dengan kompetensi dasarnya yang diajarkan. Perhatikan buku teks sangat penting berkaitan dengan kualitas dan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Akan tetapi, melimpahnya jenis dan model buku pelajaran (khususnya buku PAI) di masyarakat itu, apakah sudah bisa dimaksimalkan pemanfaatannya oleh mereka yang terlibat langsung dalam proses pendidikan formal di Sekolah Dasar? Belum lagi jika dikaitkan dengan kreatifitas guru dan siswa dalam rangka pemenuhan asa religiusitas yang membutuhkan buku-buku agama Islam penunjang lainnya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keterpenuhan pemahaman mendalam, terkait penjelasan-penjelasan tambahan atas materi agama Islam yang tertuang dalam buku wajib PAI yang sudah ada/dianjurkan/diberlakukan. Tentu saja hal ini menjadi catatan tersendiri terkait aspek teknis dan sistem pemanfaatan buku-buku yang boleh jadi belum/tidak terdistribusi baik di sekolah. Artinya, peluang untuk memaksimalkan pemahaman keagamaan melalui buku-buku pelajaran dan atau buku penunjang lainnya yang berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya secara kuantitas memang masih dianggap kurang tersedia dengan baik di sekolah-sekolah, baik pegangan guru PAI maupun ketersediaan di perpustakaan sekolah. Demikian halnya dengan buku pegangan Pendidikan Agama Islam dan budi pekerti Kurikulum 2013 yang pengadaannya masih berbasis *internet download services*.

Guru kelas atau guru agama tidak berani menfotokopi buku tersebut untuk dibagikan kepada murid-muridnya, mereka tidak mau

ambil risiko. Seperti penuturan Marwiah Halim (Guru Pendidikan Agama Islam):

Tidak *beraniki* pak, nanti kita dikira dagang, apalagi sekarang *kan* masyarakat *taunya* pendidikan gratis. Jadi kita simpan saja bukunya di tempat fotokopi. Kalau ada yang mau silahkan ke sana. Nanti ada selisih *nakirami* kita cari untung, bisa-bisa kita masuk Koran.

Berdasarkan kondisi riil di atas, mana mungkin murid membeli buku-buku penunjang, buku wajibnya saja tidak memadai. Guru-gurunya pun demikian adanya, mereka hanya punya buku pegangan wajib, yakni KTSP dan K-13. Mereka pada umumnya beralasan, bahwa bila mereka membeli buku tidak ada juga waktu untuk membaca. Buku pegangan sudah cukup bagi mereka dalam membekali murid-muridnya di sekolah.

Pemanfaatan buku PAI di SDN 1 Mamuju telah mengacu kepada K-13 berdasarkan instruksi Bupati Mamuju. Kurikulum 2013 (K-13) merupakan penyempurnaan terhadap kurikulum-kurikulum sebelumnya. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 1 butir 19 menjelaskan, bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai panduan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Adapun kurikulum sebelum K-13 adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP 2006). Implementasi KTSP Tahun 2006 masih dijumpai beberapa masalah seperti:

1. Konten kurikulum masih terlalu padat yang ditunjukkan dengan banyaknya mata pelajaran dan banyak materi yang keluasan dan tingkat kesukarannya

melampaui tingkat perkembangan usia anak.

2. Kurikulum belum sepenuhnya berbasis kompetensi sesuai dengan tuntutan fungsi dan tujuan pendidikan nasional.
3. Kompetensi belum menggambarkan secara holistik, domain, sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
4. Beberapa kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan (misalnya pendidikan karakter, metodologi pembelajaran aktif, keseimbangan *soft skill* dan *hard skill*, kewirausahaan) belum terakomodasi di dalam kurikulum.
5. Kurikulum belum peka dan tanggap terhadap perubahan sosial yang terjadi baik pada tingkat lokal, nasional maupun global.
6. Standar proses pembelajaran belum menggambarkan urutan pembelajaran yang rinci, sehingga membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam dan berujung pada pembelajaran yang berpusat pada guru.
7. Standar penilaian belum mengarahkan pada penilaian berbasis kompetensi (proses dan hasil) dan belum secara tegas menuntut adanya remediasi secara berkala.
8. Dengan KTSP memerlukan dokumen kurikulum yang lebih rinci agar tidak menimbulkan multitafsir (Kementerian Agama RI. 2014 Panduan Umum Implementasi K-13: 1-2).

Berdasarkan masalah-masalah yang ditemukan pada KTSP Tahun 2006 di atas, disempurnakanlah dengan Kurikulum 2013 yang merupakan kurikulum sebelumnya untuk mersepon tantangan internal dan

eksternal. Titik berat pada Kurikulum 2013 adalah penyempurnaan pola pikir, penguatan tata kelola kurikulum, pendalaman, dan perluasan materi, penguatan proses pembelajaran, dan penyesuaian beban belajar agar dapat menjamin kesesuaian antara apa yang diinginkan dengan apa yang dihasilkan. Pengembangan kurikulum menjadi amat penting sejalan dengan kontinuitas kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya serta perubahan masyarakat pada tataran lokal, nasional, regional, dan global di masa depan. Aneka kemajuan dan perubahan itu melahirkan tantangan internal dan eksternal dalam bidang pendidikan. Karena itu, implementasi Kurikulum 2013 merupakan langkah strategis dalam menghadapi globalisasi dan tuntutan masyarakat Indonesia masa depan (Kementerian Agama RI 2014, Panduan Umum Implementasi K-13).

Tujuan luhur dari K-13 diapresiasi oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju, dalam hal ini Bupati Mamuju menginstruksikan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga agar mengimplementasikan K-13 tersebut pada semua jenjang tanpa melihat kesiapan sekolah tersebut. Instruksi itu juga bertolak belakang dengan anjuran Kementerian Pendidikan dasar dan Menengah, bahwa bagi sekolah yang sudah melaksanakan K-13 selama tiga semester bisa tetap memakai K-13, namun bagi sekolah yang belum menerapkan atau hanya satu semester dianjurkan untuk tetap memakai kurikulum KTSP. Fenomena pemberlakuan K-13 secara merata dan terkesan dipaksakan di Kabupaten Mamuju berakibat pada proses belajar mengajar.

Saya sebagai pengawas tidak permasalahan mau pakai kurikulum apa,

yang penting sekarang bagaimana anak-anak tersebut bisa belajar. Saya sampaikan kepada kepala sekolah dan guru, terserah Anda, apakah mau pakai KTSP atau K-13, terserah, yang penting anak-anak belajar. Kasian guru-guru di Mamuju mereka pusing mau pakai yang mana. Jadi kalau ada dari Kabupaten yang menanyakan kepada guru mereka menjawab memakai buku Kurikulum 2013, tapi kenyataannya tidak. Sebagian besar sekolah di Mamuju bila meng-*input* data tidak bias diterima pusat, karena kita meng-*input* dengan K-13, sementara di pusat kita masih kurikulum lama. K-13 itu baik, sangat baik, tapi guru-guru kita di daerah belum siap, seharusnya sebelum diterapkan perbanyak dulu pelatihan, perbanyak bukunya, baru diterapkan (Muh. Hasyim/pengawas kec. Papalang).

Apa yang dikeluhkan Muh. Hasyim di atas hampir sama semua keluhannya dengan guru-guru dan kepala sekolah di Mamuju. Kekurangan sarana pembelajaran menjadi masalah pokok. Demikian halnya dengan guru-guru agama di Mamuju, dari lima guru agama yang ada di SDN I Mamuju, satu orang di SDN Tahaya-haya, dan satu orang di SD Inpres Salu Kayu I, mereka tidak pernah mengikuti pelatihan, seperti pelatihan pembuatan RPP yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Buku paket yang ada hanyalah usaha mereka sendiri, sementara buku memiliki manfaat, seperti:

1. Meningkatkan perhatian dan motivasi belajar,
2. Memberikan variasi dalam belajar,
3. Memberikan struktur yang memudahkan belajar,
4. Menyajikan inti informasi belajar,
5. Memberikan contoh-contoh yang lebih konkrit,
6. Merangsang berpikir analisis,
7. Memberikan situasi belajar yang tanpa tekanan.

Fungsi buku teks bagi guru adalah sebagai pedoman untuk mengidentifikasi apa yang harus diajarkan atau dipelajari oleh siswa, mengetahui urutan penyajian bahan ajar, mengetahui teknik dan metode pengajarannya, memperoleh bahan ajar secara mudah, dan menggunakannya sebagai alat pembelajaran siswa di dalam atau di luar sekolah. Adapun fungsi buku teks bagi siswa adalah sebagai sarana kepastian tentang apa yang ia pelajari, alat kontrol untuk mengetahui seberapa banyak dan seberapa jauh ia telah menguasai materi pelajaran, alat belajar (di luar kelas buku teks berfungsi sebagai guru) di mana ia dapat menemukan petunjuk, teori, maupun konsep dan bahan-bahan latihan atau evaluasi.

Dalam penelusuran kepada beberapa sumber diperoleh informasi, bahwa idealnya mekanisme pengadaan dan pemanfaatan buku itu adalah:

Tabel 1  
Mekanisme Pengadaan dan Pemanfaatan Buku

No	Kegiatan	Pemerintah	Swasta	Sekolah
1	Menyusun/ mempersiapkan naskah		v	
2	Menerbitkan naskah menjadi buku		v	
3	Menilai buku	v		
4	Memasarkan buku		v	
5	Memilih buku			v
6	Membeli buku			v
7	Mengirim buku ke sekolah		v	
8	Penggunaan buku			v
9	Mengawasi ketersediaan dan pemanfaatan buku di sekolah	v		v
10	Menyediakan dana untuk semua kegiatan	v	v	v

Berdasarkan tabel di atas tampak, bahwa:

1. Peranan pemerintah dalam penyediaan buku pelajaran semakin dikurangi dan bergeser ke swasta dan sekolah. Tampaknya, kebijakan ini sejalan dengan swastanisasi, desentralisasi, dan otonomi serta manajemen berbasis sekolah, yang belakangan ini dikembangkan pemerintah.
2. Pemerintah menempatkan diri sebagai pengawas mutu pelajaran melalui penilaian dan penetapan buku pelajaran yang memenuhi syarat dan pengawasan dalam pemanfaatannya di sekolah serta penyediaan dana pembelian buku pelajaran. Dana tersebut dapat bersumber dari pusat (APBN) dan daerah (APBD).
3. Swasta, dalam hal ini penerbit buku menyediakan naskah sampai penerbitannya menjadi buku pelajaran dan mengajukannya kepada pemerintah untuk dinilai. Sistem penilaian yang dianut memungkinkan beberapa judul buku dari penerbit yang berbeda memenuhi syarat untuk disahkan sebagai buku pelajaran dalam mata pelajaran yang sama dan kelas yang sama. Penerbit diberikan kebebasan mempromosikan bukunya sesuai dengan tata niaga buku serta bertanggung jawab atas pengiriman buku itu sampai ke sekolah sesuai dengan jumlah dan waktu yang ditetapkan sekolah sebagai pembeli.
4. Sekolah semakin berperan dalam penyediaan buku pelajaran yang dipakai sekolahnya. Sekolah memilih buku pelajaran untuk sekolahnya

berdasarkan pertimbangan jumlah dana yang tersedia serta kesesuaian isi buku dengan karakteristik siswa dan lingkungan setempat. Sungguh pun beberapa buku sejenis dinyatakan memenuhi syarat untuk dipilih, namun masing-masing buku itu masih memiliki ciri yang berbeda dalam penyajian, ilustrasi, dan warna. Kewenangan memilih dan membeli buku pelajaran diperoleh oleh sekolah untuk pengadaan buku pelajaran yang dananya dialokasikan ke sekolah. Apabila dananya bersumber dari APBD, pengadaan buku pelajaran dapat dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan setempat (B.P. Sitepu 2005, 113-116).

Kebijakan dalam buku pelajaran ini diharapkan dapat memecahkan berbagai masalah selama ini, dengan kebijakan ini diharapkan:

1. Buku pelajaran yang dipakai di sekolah semakin bermutu, karena melalui proses penilaian yang objektif dan menyeluruh (materi, penyajian dan teknik pembelajaran, keterbacaan serta grafika);
2. Pembelian buku pelajaran dari penerbit swasta dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan penerbitan buku pelajaran pada khususnya dan industri buku di Indonesia pada umumnya;
3. Keterlibatan sekolah dalam pengadaan buku pelajaran memotivasi sekolah menggunakan buku pelajaran lebih efektif dalam upaya meningkatkan mutu proses dan hasil belajar;
4. Buku pelajaran tersedia di sekolah pada saat diperlukan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan, dan

5. Pihak swasta/masyarakat dan sekolah juga diikutsertakan dalam pengawasan ketersediaan dan pemanfaatan buku pelajaran serta ikut mengusahakan dan untuk pengadaan buku pelajaran itu.

### **Problematika Pemanfaatan Buku Pendidikan Agama Islam di Mamuju**

Simpangsiurnya pengadaan buku dan pemberlakuan kurikulum di Mamuju menjadi masalah utama pelaksanaan proses pembelajaran. Pengadaan buku, khususnya buku PAI tidak jelas siapa yang harus bertanggung jawab, antara Diknas dan Kemenag saling melempar tanggung jawab. Selain itu, instruksi Bupati untuk melaksanakan K-13 pada semua sekolah di Mamuju tanpa ditunjang oleh sarana dan prasarana.

Implementasi dari hasil diterapkannya K-13 di sekolah-sekolah yang telah berjalan, ternyata kurang memuaskan, baik bagi pemerintah maupun sekolah. Penghapusan sementara K-13 yang sudah diputuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan diharapkan mampu memberi kemudahan tentang metode belajar mengajar di sekolah menjadi lebih baik. Tak dapat dipungkiri bila pada pelaksanaannya efektivitas penerapan K-13 sudah mulai diragukan, sebab bukan hanya guru yang tidak siap mengajar sesuai metode, tetapi infrastruktur kurikulum pun belum tersedia semuanya.

K-13 yang digadang-gadang oleh pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai kurikulum yang paling cocok di Indonesia ternyata membuat kebingungan bagi banyak siswa dan guru. Para guru dibuat galau, sebab K-13 ini minim sosialisasi. Dengan perubahan kurikulum

dari kurikulum sebelumnya, guru belum siap menerima perubahan materi mata pelajaran yang akan diajarkan kepada siswanya. Selain itu, pengaruh K-13 membuat cara penyampaian guru menjadi berubah-ubah dan cenderung jadi tidak menguasai materi. Akibatnya, siswa pun menjadi bingung sebab tidak bisa mencerna dan mengembangkan materi mata pelajaran yang diajarkan dari K-13. Namun diharapkan, ada tidaknya kurikulum tersebut sebaiknya tidak menjadi penghambat proses belajar mengajar. Ka. SDN Sakio, Alimuddin menuturkan:

Sebaiknya pemerintah itu melihat dulu apa yang ada di lapangan, apakah sudah siap atau belum. Jangan hanya melihat sekolah di kota yang sudah maju, lihatlah kami di pedalaman yang penerangan lampunya saja belum ada. Sebaiknya sebelum sesuatu itu diterapkan seperti K-13 ini perbanyak dulu pelatihan bagi guru-guru yang akan melaksnakan di lapangan, sambil cetak bukunya. Jangan langsung dipaksakan, di mana belum ada pelatihan, termasuk bukunya belum ada pada kita, guru-guru suruh mencari sendiri di internet, bagaimana caranya di sini tidak ada listrik. Selain itu, kadang kita memesan buku, lain yang dipesan lain yang datang, terlambat lagi (Wawancara di SDN Sakio).

Apa yang dituturkan oleh Alimuddin, salah seorang Kepala Sekolah SD di Mamuju memang ada benarnya. Bagi SDN Sakio, jangankan buku PAI, guru agama yang akan mengajarkannya pun tidak ada. Pelajaran agama hanya diajarkan oleh masing-masing guru kelas. Padahal begitu besar "tanggung jawab moral dan spiritual" yang digandengkan pada pelaksanaan Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah Dasar (SD), menghendaki kesiapan seluruh perangkat pendidikan yang terlibat, untuk sedapat mungkin melakukan maksimalisasi penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam yang tepat guna. Pengejewantahannya

kemudian dilakukan dengan terus melakukan inovasi dan perbaikan pada kurikulum PAI yang merupakan salah satu komponen penting untuk mencetak generasi bangsa yang berakhlak dan bermartabat.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Ketersediaan buku PAI di Kabupaten Mamuju sangat terbatas (khususnya K-13) yang dipaksakan oleh pemerintah setempat yang menginstruksikan pemakaian kurikulum tersebut tanpa ditunjang oleh sarana dan prasarana.
2. Mekanisme pemanfaatan buku (khususnya K-13) adalah dengan cara: a) guru mengunduh di internet atau menfotokopi pada sesama guru agama, b) guru mendikte atau menyalin di papan tulis, c) murid menyalin pada saat pembelajaran atau meminjam kepada teman yang memiliki atau murid menkopi sendiri.
3. Problem pemanfaatan (khususnya K-13) adalah kurangnya sosialisasi kurikulum tersebut.

### **Saran**

1. Lembaga yang berwenang mengurus pendidikan pada SD (khususnya pendidikan agama) di Kabupaten Mamuju, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Kabupaten Mamuju perlu duduk bersama mencari solusi tentang kurangnya buku-buku agama khususnya buku pegangan guru dan murid di tingkat Sekolah Dasar.
2. Pemerintah perlu mengawasi penebitan dan penyaluran buku PAI sampai buku

tersebut benar-benar sampai di sekolah tepat waktu.

3. Pemerintah terkait perlu mengoptimalkan pelatihan-pelatihan tentang pemanfaatan buku PAI.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang membantu, sehingga

tulisan ini dapat dirampungkan, terutama para informan yang telah memberikan informasi terhadap kajian ini dan juga teman-teman di Balai Penelitian Agama Makassar yang banyak memberikan masukan disela-canda dan kritik yang membangun. Terakhir, ucapan terima kasih kepada Tim Pengelola Jurnal Penamas atas dimuatnya tulisan ini.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- As'ad, Muhammad, dkk. 2014. *Reformulasi Buku-Buku Paket Madrasah*. Makassar: Idelenggara.
- B.P. Sitepu. 2005. "Memilih Buku Pelajaran." *Jurnal Pendidikan Penabur* No. 04/Tahun IV/Tahun 2005.
- Badan Standar Nasional Pendidikan. 2006. *Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*.
- Cresswell, John W. 1994. *Research Design, Qualitative and Quantitative Approaches*. California: Thousand Oaks.
- Kementerian Agama RI. 2014. *Panduan Umum Implementasi K-13: Pendidikan Agama dan Budi Pekerti Sekolah Dasar (SD)*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama RI.
- Mayusa, Fauziah. 2013. *Perbandingan Antara Cara Belajar Menggunakan Buku dengan Menggunakan Internet terhadap Tingkat Konsentrasi Siswa*. Academia. Edu.
- Muhaimin. 2005. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah Madrasah dan Perguruan Tinggi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persana.
- Muslim, Abu. 2014. "Membaca 'Pusat Literasi' dari Pelosok Negeri (Ironi Pengelolaan Perpustakaan Madrasah Aliyah di Konawe Selatan)." *Makalah*. Disampaikan pada Seminar Nasional Hasil Penelitian Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar.
- Rikmasari, Ira dan Neneng Nurul Khaerani. 2010. *Urgensi Pendidikan Agama Islam di SD*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Sulistiyowati. Endang. 2012. "Pembelajaran PAI di Sekolah Dasar dengan Pendekatan Tematik". Dalam, *Jurnal Al-Bidayah* Vol. 4 No. 1 Juni 2012.
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.





